











































perubahan. Pandangan dapat digunakan sebagai asas dalam pengembangan diri umat manusia. Terdapat tiga dimensi dimana suatu masyarakat terbagi dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan. Konsep kelas, status dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan oleh Max Weber.<sup>20</sup> Perubahan sosial dalam Islam diprakarsai oleh Muhammad dalam konsep *jami' al-tahid*, kehadiran Muhammad mampu merubah pola pikir kaum Jahiliyah dengan bersumber dari kekuatan intelektual Nabi Muhammad. Pengaruh Muhammad sejauh ini sangat kuat dan mengakar bagi Umat Islam khususnya dan bagi umat manusia di belahan dunia, Muhammad tidak hanya pemimpin agama, tapi sekaligus penjaga etika dan moralitas umat manusia yang sangat dermawan dan selalu berbuat kebajikan.<sup>21</sup>

Peralihan status sosial seseorang diperoleh dari sejarah hidupnya yang pernah dilukiskan sebagai kontribusi untuk umat manusia, sebagaimana disebutkan di atas, yaitu Muhammad. Status sosialnya menjadi naik karena sikapnya yang bijak dan melakukan perubahan yang lebih baik untuk umat manusia di belahan dunia. Begitupun sebaliknya, status sosial seseorang akan menurun apabila melakukan perubahan yang hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Jadi, perubahan status sosial dalam penelitian ini dimaksudkan terdapat pergeseran status sosial kyai di mata masyarakat karena kyai terlibat dalam politik dan tidak fokus pada hal keagamaan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekarto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

<sup>21</sup> Munir Che Anam, *Muhammad dan Karl Marx: Tentang Masyarakat Tanpa Kelas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 127.











Kedua, banyaknya jumlah pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten Sumenep berjumlah 256. Sementara, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep adalah 1.100.724 jiwa. Ini artinya budaya santri di Kabupaten Sumenep sangat mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Sumenep merupakan satu-satunya daerah yang memiliki kota keraton di lingkungan pulau Madura. Tetapi keluarga keraton atau darah bangsawan ini tergeser oleh eksistensi kyai dalam banyak aspek. Maka tidak heran jika banyak orang tidak mengetahui kalau Sumenep adalah kota keraton.

Keempat, di tengah-tengah kentalnya budaya santri, Kabupaten Sumenep memiliki beberapa kebudayaan di antaranya *pertama*, budaya karapan sapi, budaya ini mendapat banyak perhatian orang karena merupakan tontonan rakyat. Praktik karapan sapi adalah lomba aduh cepat pada sapi, sementara Islam melarang umatnya untuk tidak menyiksa hewan. *Kedua*, budaya carok, ini dikaitkan dengan perkelahian dan harga diri, sementara kyai dalam ceramahnya melarang umatnya untuk berkelahi dan mengarahkan pada perdamaian, tetapi dalam realitas masyarakat Sumenep ada budaya carok. *Ketiga*, budaya minta-minta, Islam mengajarkan lebih baik tangan di atas dari pada tangan di bawah tetapi budaya minta-minta dijadikan profesi bagi sejumlah warga Sumenep. Budaya-budaya tersebut menjadi menarik kalau dikaitkan dengan otoritas dan pengaruh yang dimiliki seorang kyai. Kyai yang dianggap mampu



dianggap sebagai *key* informan. Setelah dari *key* informan tersebut akan diperoleh beberapa rekomendasi informan yang terkait dengan penelitian ini, demikian selanjutnya, sebagaimana putaran bola salju.

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan tema penelitian. Informan tersebut antara lain: Kyai Taufiqurrahman (selaku mantan DPRD Jatim), Kyai Tsabit Khazien (mantan DPR RI), Kyai Busyro Kariem (Bupati Sumenep), Kyai Imam Hasyim (Ketua DPRD Sumenep), Kyai Ramdan Sirajd (Mantan Bupati Sumenep), Kyai Unis Isam (anggota DPR RI Dapil Madura), Kyai Naufal (DPRD Sumenep), Kyai Akhmad Mawardi (DPRD Sumenep), KH. Abd. Hamid Ali Munir (DPRD Sumenep), Moh. Husen (DPRD Sumenep), Kyai Said Abdullah (non-politisi), terakhir adalah beberapa masyarakat berdasarkan kebutuhan.

Adapun data yang ingin dikumpulkan dalam sumber primer penelitian ini adalah: asal usul kyai mendapat gelar kyai, motif kyai berpolitik, aktivitas kyai di dalam dan di luar pondok, manfaat dan kelemahan kyai terlibat dalam politik dan implikasi kyai berpolitik. Selain hasil data diperoleh dari wawancara mendalam, data juga diperoleh dari hasil observasi di lapangan.



















- 1) Dalam pengertian abstrak (berhubungan dengan individu yang mendudukinya), status ialah suatu posisi dalam pola tertentu.
  - 2) Dilihat dari arti lainnya (tanpa dihubungkan dengan individu yang mendudukinya), secara sederhana status itu dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak dan kewajiban.
- b. Menurut Roucek Weren, status disebut sebagai berikut:
- 1) Status ialah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.
  - 2) Status sosial ialah posisi seseorang dalam masyarakat.
- c. Menurut Mayor Polak, dikatakan bahwa: Yang dimaksud dengan status ialah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek, yaitu:
- 1) Aspek stabil (struktural), yakni yang bersifat hierarki (berjenjang) yang mengandung perbandingan tinggi/ rendahsecaara relatif terhadap status-status lain.
  - 2) Aspek dinamis (fungsional), yakni peranan sosial yang berkaitan dengan suatu status tertentu, yang diharapksn dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu.
- d. Seseorang belum tentu memiliki satu status, tetapi dapat juga memiliki lebih dari satu status. Misalnya Bapak A selain berstatus sebagai suami dari istrinya, sebagai bapak dari anak-anaknya, mungkin juga sebagai ketua RT/RW, atau sebagai kepala SMA LX, dan sebagainya.
- e. Mayor Polak berpendapat bahwa:
- 1) Peranan penunjuk pada aspek dinamis dari status.

- 2) Peranan memiliki dua arti, yaitu: Dari sudut individu berarti sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang di dalamnya individu tersebut ikut aktif. Dan peranan secara umum menunjuk pada keseluruhan peranan itu dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.
- f. Dalam bahasa Indonesia “status” sama artinya dengan “posisi” atau “kedudukan”. Tetapi maknanya jelas berbeda. Status berhubungan dengan stratifikasi sosial, sedang posisi berhubungan dengan situasi (tempat, situasi lain, dan situasi diri sendiri). Contoh konkrit: (1) status: Kapten kesebelasan, pemain cadangan, (2) posisi: Gelandang, sayap kiri, dan kiper
- g. Menurut Ralph Linton kemungkinan seseorang dalam memperoleh status, ada dua macam: *Ascribed status*, ialah status yang diperoleh dengan sendirinya oleh anggota masyarakat. Misalnya dalam sistem kasta, seorang anak sudra, langsung saja sejak lahir ia berstatus sudra. Seorang anak raja langsung menjadi bangsawan. *Achieved status*, ialah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja, seperti sarjana untuk lulusan S1, magister untuk lulusan S2, dan doktor untuk lulusan S3, dan seterusnya.
- Menurut Mayor Polak, perlu ditambah satu lagi, yaitu *assigned status* ialah status yang diberikan kepada seseorang karena jasanya. Misalnya seseorang mendapat status “putra mahkota” karena











keamanan/ *safety* (bertahan hidup, seperti perlindungan dari perang dan kejahatan), (3) cinta dan rasa memiliki (keamanan/ *security*, kasih sayang, dan perhatian dari orang lain), (4) harga diri (menghargai diri sendiri), dan (5) aktualisasi diri (realisasi potensi diri).

- c. Perspektif Kognitif, pemikiran seseorang akan memandu motivasi mereka. Belakangan ini muncul minat besar pada motivasi menurut perspektif kognitif. Ini sesuai dengan gagasan R.W. White (1959), yang mengusulkan konsep motivasi kompetensi, yakni ide bahwa orang termotivasi untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif. White mengatakan bahwa orang melakukan hal-hal tersebut bukan karena kebutuhan biologis, tetapi karena orang punya motivasi internal untuk berinteraksi dengan lingkungan secara efektif.
- d. Perspektif Sosial, kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Ini membutuhkan pembentukan, pemilihan dan tercermin dalam motivasi mereka dalam menghabiskan waktu bersama teman.
- e. Motivasi Ekstrinsik dan Instrinsik
- 1) Motivasi ekstrinsik, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misal bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal.



































Melalui karyanya yang berjudul *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela* (1966), John Friedmann menjelaskan pandangannya mengenai transformasi ketiga. bahwa skala regional terdapat hirarki pusat-pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut “Pusat Pertumbuhan Primer” yang merupakan pusat utama dari daerah yang dapat merangsang pertumbuhan pusat-pusat yang lebih rendah tingkatannya; “Pusat Pertumbuhan Sekunder” yang berperan memperluas dampak perambatan ke wilayah yang tidak terjangkau oleh pusat pertumbuhan primer; dan “Pusat Pertumbuhan Tersier” sebagai titik pertumbuhan bagi daerah belakangnya. Melalui hirarki tersebut, perkembangan sistim perkotaan akan berjalan dalam empat tahap. Tahap pertama ditandai dengan tingginya tingkat isolasi masing-masing kota yang ditunjukkan dengan struktur permukiman yang sangat terbatas, kecilnya skala ekonomi, dan rendahnya mobilitas penduduk.

Pada tahap berikutnya, kota-kota yang memiliki keuntungan aksesibilitas akan mengalami proses kapitalisasi dan industrialisasi yang lebih cepat sehingga kota-kota tersebut muncul sebagai pusat dominan. Selanjutnya, melalui proses difusi dari pusat dominan, keuntungan industrialisasi disebarkan ke kota-kota sekitarnya sehingga memungkinkan kemunculan pusat-pusat baru yang lebih kecil. Dan, pada tahap terakhir, keseluruhan sistem perkotaan semakin terintegrasi dan seimbang seiring dengan terciptanya spesialisasi ekonomi pada masing-masing kota serta berkembangnya sarana transportasi.

Daerah tepi/pinggiran (*peripheri regions*) yang berada jauh dari pusat perubahan menggantungkan nasibnya kepada daerah-daerah inti. Jadi,



























maka predikat sebagai jagoan menjadi semakin tegas sehingga keberhasilan dalam carok selalu mendatangkan perasaan puas, lega dan bahkan bangga bagi pelakunya. Pihak keluarga juga umumnya tidak memandang pelaku carok sebagai orang jahat melainkan sebagai pahlawan yang sudah berhasil memulihkan harga diri. Para calon mertua di desa-desa di Madura biasanya lebih senang mendapatkan menantu yang sudah berpengalaman melakukan carok.

Meskipun semua pelaku carok menyerahkan diri kepada aparat kepolisian hal ini bukan berarti suatu tindakan yang bermakna kejantanan (sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya). Upaya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian terhadap serangan balasan keluarga musuhnya.

Sebagai perwujudan rasa bangga keluarga pada pelaku carok yang selamat, mereka biasanya melakukan upaya *nabang*. Upaya *nabang* adalah upaya mengumpulkan uang dari para anggota keluarga untuk dipakai menyuap aparat penegak hukum agar pelaku mendapatkan hukuman seminimal mungkin. Dalam konteks ini, institusi kepolisian tidak lagi berperan sebagai pengayom masyarakat melainkan justru ikut terlibat atau membantu mendorong terjadinya carok.

Kekerasan pada awalnya berasal dari budaya yang sudah diterima sebagai suatu kewajaran. Carok adalah buah ketidakadilan sejak zaman kolonial. Para penguasa tidak berhasil memberikan keadilan kepada

masyarakat. Akibatnya masyarakat memilih sendiri keadilannya. Sehingga carok menjadi budaya.

Maraknya budaya carok di Pulau Madura menyebabkan sangat lumrah dijumpai laki-laki yang selalu berpergian membawa senjata (*nyengkep*). Apalagi mereka yang dianggap sebagai jagoan di desanya. Bila berpergian tanpa senjata tajam, seakan-akan ada sesuatu yang kurang dalam tubuh mereka. Senjata tajam yang selalu dibawa kemanapun para laki-laki pergi dianggap sebagai *kancana sholawat* (teman sholawat). Bagi pemeluk Muslim memang dianjurkan untuk membaca sholawat setiap kesempatan, tidak terkecuali jika hendak berpergian. Karenanya bila setiap saat terjadi carok maka seseorang sudah siap siaga.

Sikap ksatria yang sering didengung-dengungkan dalam carok, menurut Latief kini sudah bergeser. Para pelaku carok lebih suka *nyelep* daripada *ngonggai*. Mereka menjadi semakin membabi-buta dalam menghabisi lawan-lawan atau musuh-musuhnya tanpa mempedulikan apakah lawan-lawannya dalam keadaan siap atau tidak. "Kebiasaan melakukan carok dengan cara *nyelep* maka "etika" yang bermakna kejantanan bergeser menjadi brutalisme dan egoism.

Secara kultural kenyataan ini justeru merupakan sisi hitam dari kebudayaan Madura. Padahal orang Madura juga memiliki nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kehidupan penuh harmoni sebagaimana tercermin dalam ungkapan: *rampa' naong, baringen korong* (suasana





lintasan balapnya sekitar 120 meter dan pesertanya adalah para juara *kerap keni*.

Ketiga, *Kerap Onjangan* (kerapan undangan), adalah pacuan khusus yang para pesertanya adalah undangan dari suatu kabupaten yang menyelenggarakannya. Kerapan ini biasanya diadakan untuk memperingati hari-hari besar tertentu.

Keempat, *Kerap Karesidenen* (kerapan tingkat keresidenan), adalah kerapan besar yang diikuti oleh juara-juara kerap dari empat kabupaten di Madura. Kerap karesidenan diadakan di Kota Pamekasan pada hari Minggu, yang merupakan acara puncak untuk mengakhiri musim kerapan.

Kelima, *Kerap jar-jaran* (kerapan latihan), adalah kerapan yang dilakukan hanya untuk melatih sapi-sapi pacuan sebelum diturunkan pada perlombaan yang sebenarnya.<sup>16</sup>

Budaya karapan sapi dilestarikan sampai sekarang bahkan menjadi salah satu kekayaan budaya di Indonesia yang mendapat perhatian dari beberapa negara asing.

Setiap daerah memiliki keragaman budaya dan permasalahan tersendiri, adapun pola permasalahan-permasalahan dalam masyarakat Sumenep beserta macam jumlahnya dalam satu tahun, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Samra, *wawancara*, Pemerhati dan Peserta Karapan Sapi warga Sumenep, pada 29 Juli 2012. Lihat juga <http://karapan-sapi.html>.



sebanyak 481 kasus. Kasus terbanyak adalah penganiayaan ringan sebanyak 81 kasus, diikuti pencurian pemberatan sebanyak 65 kasus, dan perjudian sebanyak 35 kasus.

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010 sebanyak 112 kasus kecelakaan yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009. Kenaikan ini diikuti juga oleh kenaikan jumlah korban meninggal, luka berat dan luka ringan.

Perkara perdata dan pidana yang masuk pada tahun 2010 masing-masing 13 kasus dan 388 kasus. Sedangkan 16 perkara perdata dan 421 perkara pidana telah diputuskan.

Menurut Rumah Tahanan Kabupaten Sumenep jumlah narapidana pada tahun 2010 sebanyak 391 orang dengan jumlah kejahatan terbanyak sisanya yang lain-lain yaitu berjumlah 122 buah kasus.

#### **D. Keagamaan**

Masyarakat Sumenep termasuk daerah homogen dalam soal agama, mayoritas Islam Nahdatul Ulama (NU), sementara organisasi masyarakat lainnya juga ada yaitu Muhammadiyah cuma masih sangat minim. Ada juga gereja hanya berjumlah dua buah se Kabupaten Sumenep dan sepi sekali jamaahnya. Mayoritas Islam NU itu ditandai dengan banyaknya jumlah kyai dan pesantren di Sumenep dengan pola-pola ala NU.

Adapun banyaknya tempat peribadatan menurut agama yang diakuni, yaitu:

















Trunojoyo. Sedangkan swalayan di kabupaten Sumenep berjumlah 25 buah. Di Sumenep belum terdapat plaza/ mall. Terdapat juga beberapa pasar hewan yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan taman bunga atau alun-alun Sumenep setiap sore sampai malam hari digunakan pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya dan aneka hiburan keluarga.

Lembaga keuangan, lembaga keuangan/ perbankan di samping untuk perorangan juga mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Jumlah bank baik bank pemerintah maupun swasta di kabupaten Sumenep tahun 2011 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Bank pemerintah meliputi BRI, BNI, bank Mandiri, bank Jatim dan BTN. Bank swasta nasional meliputi BTPN, bank Danamon simpan pinjam dan bank Bukopin. Untuk bank swasta asing/campuran yaitu BCA dan. BRI unit berjumlah 13 unit serta bank perkreditan rakyat berjumlah 5 unit.

#### **G. Politik**

Dinamika politik di Sumenep tidak lepas dari pengaruh kyai, persaingan politik berada di seputar perbincangan antar kyai di Sumenep. Tingkat pemahan masyarakat Sumenep terhadap politik masih jauh dari sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini, karena pilihan masyarakat masih ditentukan oleh kyai, banyak pemilih tidak tahu kandidat yang dipilihnya. Makna demokrasi yang ditawarkan oleh bangsa kita belum bisa terapkan maupun diterima secara menyeluruh oleh warga Sumenep.

Dinamika politik di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada hasil pemilihan legislatif tahun 2009, di antaranya:

Tabel XIV

## Hasil Perolehan Suara Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Sumenep 2009

No	Partai Politik	Jumlah Total Suara
1	Partai Hati Nurani	3711
2	Partai Karya Pedulu Bangsa	3280
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	-
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1297
5	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2444
6	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	344
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4950
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	3685
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-
11	Partai Kedaulatan (PK)	-
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11879
14	Partai Pemuda Indonesia	-
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	34
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	-
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	161
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	27
21	Partai Republik Nusantara (Republikan)	-
22	Partai Pelopor (PP)	-
23	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2495
24	Partai Persatuan Pembangunan	9940
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	-
26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	-
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	4526
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	58
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1826
30	Partai Patriot (PP)	611
31	Partai Demokrat (PD)	2177
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	-
33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	-
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	3868
41	Partai Merdeka	-
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia	-
43	Partai Serikat Indonesi (PSI)	42
45	Partai Buruh	46
<b>JUMLAH</b>		<b>67.202</b>

















			Cabang Sumenep
3	KH. Khairul Amin	a. Pengasuh PP Nurul Fatah b. Putra seorang kyai	a. Pengurus PDI-P Cabang Sumenep b. Anggota DPRD Sumenep Komisi A
4	KH. Abd. Hamid Ali Munir	a. Memiliki madrasah tetapi tidak memiliki pesantren b. Putra seorang kyai	a. Ketua Komisi C DPRD Sumenep b. Pengurus PKB Cabang Sumenep
5	KH. A. Kurdi HA	a. Pernah mondok di Jawa beberapa tahun tetapi tidak memiliki pesantren b. Tidak memiliki garis keturunan kyai	a. Anggota DPRD Sumenep Komisi C b. Pengurus Partai Demokrat Cabang Sumenep
6	KH. Akhmad Mawardi	a. Pengasuh PP Al-Islahiyah b. Ayahnya seorang kyai c. Kepala sekolah MA Al-Islahiyah	a. Pengurus PKB Cabang Sumenep b. Anggota DPRD Sumenep Komisi C
7	KH. M. Naufal	a. Keluarga Besar PP Aswaja b. Putra seorang kyai	a. Kader PKB Cabang Sumenep b. Anggota DPRD Sumenep Komisi D
8	KH. Ramdan Sirajd	a. Pengasuh PP Nurul Islam b. Putra seorang kyai	a. Mantan Bupati Sumenep b. Pengurus PKB
9	KH. Waris Ilyas	a. Pengasuh PP Annaqayah Guluk-Guluk b. Putra seorang kyai	a. Mantan MPR RI b. Penasehat PKB
10	KH. Tsabit Khazien	a. Keluarga besar PP Annaqayah b. Putra seorang kyai	a. Penasehat PKB b. Anggota DPR RI
11	KH. Taufiqurrahman	a. Perintis dan Pengasuh PP Mathlabul Ulum b. Menantu seorang kyai	a. Penasehat PKB Cabang Sumenep b. Mantan DPRD Jatim
12	KH. Unis Isam	a. Keluarga besar PP Aswaja b. Putra seorang kyai	a. Pengurus PKB b. Anggota DPR RI
13	KH. Said Abdullah	a. Pengasuh PP Mathali'ul Anwar b. Putra seorang kyai	-





pondok pesantren, meskipun tidak mempunyai garis keturunan kyai tetapi karena ilmu dan prestasi yang dimiliki oleh orang tersebut maka gelar kyai diberikan oleh sejumlah masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas prestasi-prestasi dan kemampuannya. Tipe seperti ini biasa disebut kyai prestatif.

Di antara beberapa kyai yang tercantum pada tabel di atas, yang termasuk kyai prestatif berdasarkan daftar kyai dalam objek penelitian ini adalah KH. A. Kurdi HA. Dia memiliki kapasitas yang mumpuni dan mendirikan pondok pesantren, untuk anak-anaknya atau keturunannya akan mendapat gelar kyai adaptif dari masyarakat. Sementara, KH A. Kurdi HA adalah generasi pertama yang merintis pondok pesantren dan mendapat gelar kyai.

Model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik yang terjadi. Perubahan bagi kyai merupakan tawaran nilai dari sesuatu yang baru, yang mungkin saja mengandung hal yang lebih baik dari nilai lama. Dengan demikian, kyai bisa dikompromikan untuk diterima. Sikap ini membuat mereka lebih berani untuk terjun pada perubahan sosial politik yang terjadi sambil mentransformasikan nilai-nilai lama. Perubahan sosial politik dengan cara ini bisa tetap berjalan dalam jalur yang aman, tidak bersitegang dengan tradisi yang telah berkembang.

Berkaitan dengan aspek teologis ini, di antara hal menarik dari studi yang dilakukan adalah adanya perbedaan yang signifikan































Dari pernyataan warga Sumenep terhadap peran kyai di Sumenep, ada kaitannya dengan tawaran teoritis Marx tentang penghapusan kelas dalam masyarakat, bahkan agama dilarang tegak dan tidak mempercayai tuhan (*distrust God*) karena dianggap candu bagi manusia dan masyarakat. Karena agama muncul disebabkan adanya perbedaan kelas sosial. Agama menjadi produk perbedaan kelas. Agama merupakan perangkat yang dipasang oleh kelas penguasa untuk menjerat kelas proletariat yang tertindas. Apabila perbedaan kelas itu hilang, maka agama dengan sendirinya akan lenyap sebab pada saat itu perangkat (agama) tidak dibutuhkan lagi.<sup>40</sup>

Secara teoritis pandangan Marx ada kaitannya dengan realitas Masyarakat Sumenep. Masyarakat kelas bawah menjadi korban dari kelas-kelas sosial dalam hal ini sikap kyai dalam menentukan kelas sosialnya. Sehingga agama terkesan hanya untuk kelas borjuis, sementara masyarakat proletariat hanya sebagai prajurit atau pengikut kyai saja tanpa adanya cela untuk berpikir kritis.

Motif peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik dalam konteks masyarakat Sumenep adalah suatu keniscayaan, mengingat kelas sosial kyai menempati lapisan kelas paling atas dan pengaruhnya dapat menggerakkan masyarakat dan kebijakan. Oleh sebab itu, pengaruh yang dimiliki oleh seorang kyai dianggap efektif untuk terlibat dalam

---

<sup>40</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, 290. Lihat juga Murtadha Mutahhari, *Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam atas Maxisme dan Teori Lainnya* (Bandung: Mizan, 1982), 292.











Politik yang membawa nama besar seorang kyai sudah menjadi budaya yang begitu kental. Meski sudah ada batasan bahwa kyai hanya bertugas mengurus umat dan tidak untuk terlibat ke dalam politik praktis. Kharisma yang dimiliki seorang kyai banyak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Setelah menjadi pemimpin, budaya sungkem terhadap kyai tidak pernah ditinggalkan, hal ini merupakan bentuk untuk melatankan kekuasaan. Agar dukungan dari kyai tidak lepas, walaupun beberapa upaya sudah dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kyai untuk mengalihkan dukungan tersebut. Untuk melatangkan kekuasaan maka seorang pemimpin berusaha meminta nasihat yang akan dijalankan dalam kebijakan politik.

Kebijakan-kebijakan kepala desa misalkan, dia akan mengutamakan beberapa program yang berkaitan dengan keagamaan. Semakin banyak dukungan terhadap kepentingan kyai maka semakin strategis mendapatkan simpati masyarakat.

Untuk lebih terperinci dalam menaparan keuntungan seorang kyai terlibat dalam politik atau implikasi konstruktif yang diperoleh seorang kyai ketika terlibat dalam politik, di antaranya adalah sebagai berikut:

**a. Implikasi Agama**

Agama memberikan penjelasan tentang sesuatu yang ghaib, baik-buruk, sakral dan profane, tatacara berhubungan dengan Tuhan maupun



tugas kyai adalah bagaimana menjaga nilai-nilai itu tetap lestari, diikuti, dan diaplikasikan oleh masyarakat. Maka dari itu dakwah adalah media dalam menyampaikan sebuah kebenaran dan keluhuran nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat.

Motif bergabungnya kyai pesantren ke dalam politik praktis didasari oleh alasan untuk memperjuangkan Islam melalui jalur struktural, sekaligus sebagai bentuk perjuangan moral di dalam dunia perpolitikan. Keterlibatan kyai dalam politik akan mendatangkan keuntungan bagi institusi pesantren, yakni perubahan dan perbaikan sarana dan prasarana pesantren lebih mudah dilakukan. Juga citra bahwa seorang kyai selalu minta bantuan finansial untuk umatnya dalam pembangunan infrastruktur pesantren sudah berkurang, karena biaya pembangunan dan pengembangan fisik pesantren sudah dibiayai oleh negara. Sehingga beban ekonomi umat pun semakin berkurang.

#### **b. Implikasi Politik**

Peran kyai pesantren dalam bidang politik ini menarik diteliti karena beberapa alasan, di antaranya; *Pertama*, kyai adalah figur yang sangat berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam pelbagai bidang. *Kedua*, kyai memerankan peran yang signifikan dalam menarik dukungan dari umat untuk mengikuti pilihan politik tertentu.

Posisi strategis tersebut menjadikan kyai memiliki potensi besar untuk terlibat dalam politik karena di samping memiliki pengaruh kharismatik, kyai juga ikut berperan dalam perubahan sosial. Kyai





ke lembaga legislatif karena ingin mengawal kebijakan-kebijakan dalam pengalokasian APBD.

Penelusuran pemikiran teologis kyai dalam hal ini dilakukan dengan merujuk pada konsep iman. Iman yang berakar pada corak teologis tertentu pada dasarnya bersifat individual. Namun demikian, para pemeluk agama juga sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri, sebagai pribadi-pribadi yang terpisah dari individu lainnya. Mereka membentuk komunitas tertentu yang apabila telah mapan atau melembaga dalam suatu masyarakat akan terbentuk apa yang disebut pranata baru. Pada saat terjadinya pranata baru inilah dalam masyarakat kemudian muncul elite sosial tertentu yang menjadikan iman sebagai *habatus* (ciri yang menjadi identitas suatu kelompok).

Begitu juga halnya dengan orientasi politik yang berbeda, bisa menjadi faktor munculnya *gap-gap* politik di antara sesama kyai sehingga tidak bisa menafikan adanya upaya untuk saling jatuh-menjatuhkan antara satu kyai dengan kyai yang lain akan saling, bisa jadi, kecam dan saling hantam. Inilah embrio awal lahirnya perseteruan baru di kalangan kyai. Hubungan di antara satu kyai dengan kyai yang lain akan mengalami puncak ketegangan yang akan berdampak terhadap eksistensi kyai dalam membangun kehidupan masyarakat dan pesantren. Korbannya sudah jelas, yaitu, masyarakat dan pesantren.

Posisi teologis dan peran sosial-politik kyai di Sumenep yaitu kyai sebagai sentral dalam memecahkan masalah agama, bahkan posisi kepala





Pesantren juga dituntut menyampaikan aspirasi umat tersebut ke hadapan umara. Sudah selayaknyalah pengasuh pesantren harus menjembatani kepentingan rakyat dan penguasa. Walaupun begitu, tidak berarti semua pengasuh pesantren harus terjun ke dunia politik, apalagi politik praktis, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas managerial pesantren, dan pengaruh yang dimiliki kyai bagi santri dan masyarakat di sekitarnya. Begitu pula kalau pesantrennya dikhawatirkan terbengkalai, kyai harus membenahi dulu pesantrennya.

Keterlibatan kyai dalam politik dapat mengurangi beban ekonomi para santri dan keluarga santri, karena untuk pembangunan dan perbaikan pesantren tidak lagi meminta sumbangan terhadap santri maupun keluarga santri serta warga sekitar pesantren sebagaimana dilakukan seorang kyai sebelumnya dalam menjaring finansial untuk pembangunan pesantren. Setelah kyai terlibat dalam politik maka penjaringan finansial terhadap masyarakat akar rumput sudah berhenti karena dari pemerintah sudah ada jata pembangunan, dengan terlibatnya kyai dalam politik maka seorang kyai dapat mempengaruhi kebijakan dengan merekomendasikan perbaikan dan perkembangan untuk kemajuan pesantren, hal tersebut sebagai suatu upaya untuk kesejahteraan masyarakat bawah.

Di samping itu perbaikan infrastruktur pesantren juga semakin lebih baik, dengan ditambahkan beberapa fasilitas untuk kebutuhan belajar. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut lebih mudah ketika kyai terlibat











Max Weber mengakui bahwa empat jenis tindakan sosial yang diutarakan adalah merupakan tipe ideal dan jarang bisa ditemukan dalam kenyataan. Tetapi lepas dari persoalan itu, berdasarkan data lapangan prilaku politik kyai di Sumenep termasuk jenis tindakan sosial yang pertama yaitu, rasional, di sini prilaku politik kyai di Sumenep yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

Maka dari itu, dari analisa Weber pada prilaku politik kyai secara rasional dengan pilihan-pilihan atas tujuan yang lebih bersifat kausal, sehingga kyai dengan pilihannya bertujuan dan ingin berubah lebih baik. Dengan pola ini melihat peranan kyai yang sampai hari ini masih dalam konteks kyai yang belum terkontaminasi terhadap politik maka dari pada itu masyarakat Sumenep dalam pandangannya kyai sebagai satu pilihan. Dengan teori Weber itu, relasi prilaku politik kyai (Konstituen) dan masyarakat dapat dijelaskan dengan argumentasi, bahwa pemaknaan individu-individulah yang melahirkan sebuah konsensus, dan konsensus itulah yang pada akhirnya menciptakan relasi-relasi di antara mereka di tengah prilaku politik kyai dan masyarakat terjaga utuh ketika kyai terjun dalam politik dewasa ini.

## **2. Implikasi Destruktif**

Fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kyai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor. *Pertama,*

faktor posisi sosial kyai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi (1978), misalnya, menunjukkan kekuatan kyai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz (1960) menunjukkan kyai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kyai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini.<sup>64</sup> Meskipun secara politis kyai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.

*Kedua*, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, kyai dipandang memiliki kemampuan “luar biasa” untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap “fatwa” politik yang terakhir untuk diikuti. Sebagai contoh kasus Gus Dur yang tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI ketika itu, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena “nasehat-nasehat” kyai yang mendorong untuk mengambil keputusan seperti itu.

---

<sup>64</sup> Achmad Patoni, *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 103.







umatnya semakin menurun. Orientasi kyai tampak mengejar kekuasaan, tidak lagi murni untuk kepentingan umat.

Kadang pengajian dan dakwah dijadikan senjata politis kyai untuk mempengaruhi masyarakat. Beberapa orang memanaatkan forum ini sebagai ajang politik untuk mendapat eksistensi dan dukungan dari masyarakat. Politik kyai bukan sebuah bencana ketika dimaknai dengan benar dan proposional. Dari kacamata teoritis, haluan politik bagi kyai bukan barang haram. Bahkan, jika merujuk pada kaidah *ushul fiqh*, hukum berpolitik menjadi wajib, minimal wajib kifayah.<sup>67</sup>

Budaya politik kyai, pada dasarnya budaya politik Islam menempatkan seorang ulama (kyai) dalam posisi strategis, dalam menentukan aturan. Penguasa berperan sebagai penegak aturan untuk mempersatukan ummah. Karakteristik politik ini memang sudah merupakan bawaan semenjak awal mula kemunculan Islam. Hukum Islam yang merupakan hukum syariah adalah hukum suci yang digencarkan ulama atau pemimpin keagamaan Islam.

Identitas komunitas keagamaan dimantapkan (terutama menurut hukum suci-syariah) yang dilancarkan oleh pemimpin keagamaan, yakni kaum ulama dan diselenggarakan oleh para penguasa. Dalam kelompok ini berkembang suatu hubungan yang sangat unik dalam kalangan ulama merupakan golongan yang pasif secara politik atau patuh kepada para

---

<sup>67</sup> Masruhan, *Konflik Politik Kiai NU dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008*, ringkasan disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010, 41.



politik. Kesibukan-kesibukan yang tidak substansial tersebut ialah ketika terpilih menjadi anggota DPR di antaranya seperti sibuk membangun jejaring ekonomi, membangun jejaring sosial dengan tatanan elit, mendatangi beberapa forum seremonial, dan manggung di berbagai kegiatan untuk memperkuat eksistensinya sementara urusan pesantren terkesampingkan.

Politik kyai akan berubah menjadi proses degradasi kultur dan nilai jika dimanifestasikan dalam ruang politik praktis yang bersifat jangka pendek dan sesaat, seperti halnya, dukung-mendukung tokoh tertentu untuk merebut kepemimpinan partai politik, menjadi juru kampanye calon pejabat eksekutif, dan sebagainya. Sejatinya, politik kyai harus diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang dan menyangkut hal-hal fundamental masyarakat seperti kesejahteraan dan pendidikan, serta politik yang bersifat strategis menyangkut eksistensi dan kemandirian Negara.

Dengan demikian, keterlibatan kyai dalam momentum politik di Sumenep, merupakan suatu bukti komitmen dari para kyai untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berbasiskan nilai-nilai yang ada dalam Islam, serta secara khusus dalam rangka untuk memajukan pendidikan yang ada pesantren di kabupaten Sumenep. Namun dalam realitasnya, gerakan politik para kyai, tampaknya belum menjadi satu kekuatan yang utuh yang bisa merombak kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik, padahal, sejak reformasi, dalam struktur pemerintahan, baik

ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, banyak kyai yang menjadi bagian di dalamnya. Akan tetapi, perubahan drastis yang diamanatkan oleh reformasi belum sepenuhnya bisa menjadi fakta yang membanggakan, sehingga dalam realitasnya memunculkan sebuah kesan sederhana bahwa kyai dengan posisi strukturalnya belum mampu menghasilkan kerja-kerja yang berkualitas.

Perhatian kyai pada umumnya memusatkan pada dunia pendidikan. Urusan sosial politik akhirnya cenderung ditelantarkan. Hal ini tercermin, salah satunya, pada materi yang diajarkan, yang masih terbatas hanya pada materi-materi disekitar ibadah privat dan menafikan (tidak memberikan perhatian serius) urusan ibadah publik. Sehingga, ketika arus reformasi pertama kali merabak ke permukaan, banyak kyai yang tampak gagap dalam menanggapi kondisi tersebut.

Perubahan-perubahan situasional menyangkut kecenderungan dan pilihan politik yang terjadi, ada tipe kyai yang memilih diam ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik. Mereka biasanya memilih untuk lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah) yang dimilikinya, ketimbang ikut terlibat dalam urusan sosial politik yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kehancuran lembaga dakwah tersebut.

#### **d) Budaya Lokal Luntur**

Dari beberapa pola-pola politik kyai Sumenep yang dibahas dalam penelitian ini peneliti sengaja mencoba memaparkan juga secara





dilakukannya senantiasa berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan yang dimilikinya. Symbolisme keagamaan sendiri bagi kaum beragama merupakan hal yang sangat penting, karena ia merupakan tempat keterbukaan psikologis yang asing dan mengantarkan perilaku-perilaku pribadi yang khusus.

Dari penelitian ini, ditemukan beberapa hal yang tampaknya berbeda dari apa yang diramalkan Arkoun. *Pertama*, walaupun tetap menggunakan pemikiran agama Islam dengan corak pemikiran abad pertengahan, namun kyai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Apa yang digariskan ulama abad pertengahan, tidak diterima begitu saja, tetapi ditafsir ulang sesuai dengan kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya.

Tafsir yang dilakukan kyai memang tidak merupakan kritik pada esensi yang ditawarkan ulama abad pertengahan, juga tidak langsung pada al-Quran ataupun Hadits, tetapi dengan cara melakukan tafsir sosial dan tekstual melalui metode berpikir *Usl al-Fiqh* yang dipinjam dari ulama abad pertengahan. Dengan berdasar pada kaidah *usl al-fiqh*, "*al-muhafazhatu 'ala al-qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah*," misalnya, para kyai menjadi sangat akomodatif pada perubahan baru yang ditawarkan alam pikiran modern atau alam pikiran yang didominasi tradisi lokal yang ada.



Dalam tulisan Miftah Thoha mengelompokkan berbagai pemimpin, kepemimpinan seperti kyai termasuk dalam kepemimpinan situasional, yang mana seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi pengikutnya, dan secara ketat megawasi pelaksanaan tugas mereka.<sup>73</sup>

Pemaknaan masyarakat kehilangan pemimpin di sini adalah umat kehilangan sosok kyai yang mengayomi, selalu membuka pintu umat untuk berkelu kesah. Sementara, ketika kyai terlibat dalam politik, sebagian besar sifat-sifat tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang kyai, dan pada akhirnya masyarakat kehilangan sosok kepemimpinan dari kyai. Karena kesibukan-kesibukan kyai dalam politik maka urusan umat jadi terkesampingkan dan merindukan sosok itu.

Warga tidak pernah diberikan alasan yang rasional kenapa harus memilih salah satu partai tertentu. Dari kebingungan-kebingungan yang dirasakan warga maka semakin hari secara alamiah ditambah dengan tontonan televisi dan surat kabar lainnya yang dibaca, dengan begitu warga menjadi kritis dalam menentukan pilih dan seiring berjalannya waktu sadar bahwa memilih adalah hak setiap warga.

Gejala-gejala tersebut mengantarkan warga turut bersikap pragmatis dengan menjatuhkan pilihannya pada calon yang dapat memberikan uang (*money politic*) dalam pilihan kepala daerah. Hal yang

---

<sup>73</sup> Miftah Thoha, *Pemimpin dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 63. Lihat juga Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, *Management of Organizational Behavior, utilizing Human Resources* (New Jersey: Prentice Hall, 1982), 150.







Dalam masyarakat Sumenep kyai merupakan elit yang dapat menggerakkan perubahan masyarakat Sumenep, meskipun masyarakat Sumenep merupakan daerah keraton tetapi yang dapat memberikan perubahan di Sumenep adalah peneruh kyai. Sementara, pengaruh masyarakat keraton sebagai kaum bangsawan yang dihormati oleh sejumlah masyarakat tetapi pengaruh dalam politik dan perubahan sosial kurang memberikan peran.

### **1. Kondisi Sosial Sumenep Sebelum Dipimpin Kyai**

Sebagai parameter dalam menganalisa peralihan status sosial kyai ketika terlibat dalam politik praktis, maka dianggap perlu memotret sekilas kondisi sosial Sumenep sebelum kepemimpinan kyai. Karena sebelum reformasi 1998 Sumenep dipimpin oleh warga sipil yang tidak berlatar belakang seorang kyai.

Masyarakat sipil adalah masyarakat yang jumlahnya dominan dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, kondisi sosial masyarakat dikontrol oleh kepemimpinan militer yang terpusat dari atas. Pasca Orde Baru ditandai dengan digulingkannya kepemimpinan Suharto dan digantinya dengan sistem reformasi. Dengan sistem reformasi ini maka terjadi perombakan kabinet dan birokrasi, diterapkan demokrasi yang membuka lebar kran kebebasan bagi rakyat Indonesia dalam berpendapat dan memilih pejabat negara.

Peran kyai di Sumenep sebelumnya sebagai aktor yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan memasukkan budaya lokal khas Madura tetapi kyai tidak masuk dalam struktural politik praktis,

keterlibatan kyai dengan politik saat itu hanya sebagai relawan dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang tidak bisa ditangani oleh negara ataupun birokrasi. Sebagai contoh permasalahan pemberangkatan haji yang tertunda maka terjadi chaos antara warga dengan Kemenag, hal tersebut baru dapat diselesaikan setelah kyai memberikan pemahaman kepada masyarakat.

## **2. Tipologi Masyarakat Kota dan Pedalaman**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa seorang kyai yang terlibat dalam politik di Sumenep rata-rata kyai pesantren yang berasal dari pedalaman di Kabupaten Sumenep. Sementara, bagi kyai pondok pesantren yang terletak di kecamatan kota Sumenep, tidak terlibat dalam politik praktis, jadi status sosial kyai di kecamatan kota tersebut murni sebagai tokoh agama seperti KH Said Abdullah, dia tidak berafiliasi dengan politik. Oleh sebab itu dianggap perlu memetakan tipologi masyarakat kota dengan masyarakat pedalaman untuk mengetahui motif apa yang melatarbelakangi kyai pedalaman terlibat dalam politik praktis.

### **a. Masyarakat Kota**

Dalam realitas masyarakat, terdapat pola pikir dan budaya yang berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat pedalaman. Hal tersebut dipicu oleh faktor geografis, nilai, norma, budaya, organisasi kemasyarakatan, pendidikan, mata pencarian, ekonomi sarana dan prasarana di daerah tersebut.











Dalam lapisan-lapisan masyarakat, status sosial kyai menjadi naik ketika terpilih menjadi pimpinan politik, sementara citra atau reputasi kyai yang terbangun dalam masyarakat semakin menurun atas keterlibatan tersebut karena kyai dalam pengambilan keputusan terkesan pragmatis dengan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dalam praktik-praktik politik, bukan kepentingan agama yang dijadikan skala prioritas.

Kyai dengan status sosialnya sebagai tokoh agama tanpa terlibat dalam politik sudah menjadi elite yang disungkani oleh masyarakat. Apalagi ketika kyai terlibat dalam politik maka status sosialnya menjadi bertambah serta pengaruhnya juga bertambah yaitu sebagai elite politik yang dapat mempengaruhi kebijakan. Dengan keterlibatan kyai dalam politik maka dalam strata sosial masyarakat Sumenep, kyai menempati strata sosial paling atas dan pengaruhnya melebihi kaum bangsawan maupun pejabat pemerintah di Sumenep.

Implikasi sosial atas keterlibatan kyai dengan politik, dalam budaya politik di Sumenep mengakibatkan ketidaksterilan dalam budaya-budaya lokal di Madura karena banyak budaya lokal yang disponsori oleh salah satu Parpol. Sementara, keuntungan yang diperoleh Parpol tersebut adalah mendapatkan panggung pentas budaya digunakan sebagai panggung politik, hubungan tersebut sebagai kalkulasi logis. Pondok pesantren sejatinya sebagai wadah dalam melahirkan tokoh agama, karena kondisi politik di Sumenep menguntungkan kyai untuk terlibat pada politik maka lembaga pondok pesantren sering dijadikan lembaga dalam membidani lahirnya tokoh politik.





















